

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tantangan yang dihadapi beberapa Negara berkembang dewasa ini adalah mengurangi jumlah kemiskinan dengan menggunakan berbagai cara, baik melalui peningkatan infrastruktur ekonomi seperti membangun jalan, jembatan, pasar, serta sarana lain, membangun derajat dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pendidikan maupun kesehatan. Namun demikian kendala utama yang dihadapi hampir semuanya sama, yang umumnya bersumber pada permasalahan kependudukan. Mulai dari tingginya angka kematian bayi, dan ibu melahirkan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi, serta masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk, yang tidak sebanding dengan daya dukung lingkungan.

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 yang berjudul Statistik Indonesia 2021 (*Statistical Yearbook of Indonesia 2021*), jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 270.203.920 jiwa pada tahun 2020. Angka tersebut lebih tinggi atau bertambah sebanyak 2.129.360 jiwa dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 268.074.560 jiwa.

Permasalahan mengenai laju pertumbuhan penduduk di suatu Negara merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara serius, karena bila terjadi laju pertumbuhan yang besar dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah kompleks lainnya yang dapat mengganggu proses pembangunan suatu Negara.

Perkembangan program Keluarga Berencana di Indonesia mengalami suatu metamorphosis dimana ada periode BKKBN yang kemudian berkembang menjadi Kementerian Negara Kependudukan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dimulai pada tahun 1967, dengan tujuan mengatur masalah kependudukan (demografi), melalui falsafah Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Indonesia sebagai negara yang masih berkembang, di samping masalah politik, masih harus menghadapi kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, padahal jumlah penduduk sangat tinggi.

Kebijakan pemerintah mengenai keluarga berencana tertuang dalam Undang-undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 1 ayat (8) menjelaskan: “Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.”.

Program Keluarga Berencana di Indonesia, seperti juga di Negara berkembang lainnya, lebih menekankan pada pencapaian tujuan demografis yakni untuk mencapai target penurunan laju pertumbuhan penduduk. Keluarga Berencana lebih sebagai pengendalian populasi yang memberi jalan bagi negara untuk mengatur fungsi reproduktif warganya khususnya alat reproduksi perempuan.

Berikut adalah data jumlah rumah tangga dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

Tabel I.1 Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Desa di Kecamatan Purwojati 2020

Desa	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga
1. Gerduren	1.132	3,68
2. Karangtalun Kidul	1.270	3,71
3. Kaliurip	548	3,57
4. Karangtalun Lor	589	3,47
5. Purwojati	1.212	3,64
6. Klapasawit	451	3,63
7. Karangmangu	1.367	4,29
8. Kaliputih	628	3,48
9. Kaliwangi	1.042	3,46
10. Kalitapen	1.347	3,50
Purwojati	9.586	3,64

(Sumber : Purwojati dalam Angka 2021)

Menurut tabel I.1 di atas, terlihat bahwa Desa Karangmangu merupakan desa dengan jumlah tertinggi dalam prosentase jumlah rumah tangga dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga menurut desa di Kecamatan Purwojati. Rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di Desa Karangmangu adalah tertinggi dari masing-masing desa di Kecamatan Purwojati yang lain yaitu 4,29. Desa Karangmangu dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga tersebut seharusnya menjadikan Desa Karangmangu memiliki tingkat partisipasi yang baik dalam Kampung KB, karena Kampung KB mencakup seluruh anggota keluarga, seperti KB untuk PUS (Pasangan Usia Subur), BKB untuk balita, BKR untuk remaja, BKL untuk Lansia, dan lain-lain yang menyertakan seluruh anggota keluarga.

Tabel I.2 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Desa di Kecamatan Purwojati, 2019 dan 2020

No	Desa	Jumlah PUS (pasangan usia subur) 2019	Jumlah PUS (pasangan usia subur baru 2020)	Total
1	Gerduren	774	3	777
2	Karangtalun Kidul	868	4	872
3	Kaliurip	375	1	376
4	Karangtalun Lor	403	1	404
5	Purwojati	828	4	832
6	Klapasawit	308	1	309
7	Karangmangu	935	3	938
8	Kaliputih	430	0	430
9	Kaliwangi	712	3	715
10	Kalitapen	922	3	925
TOTAL		6.555	23	6.578

(Sumber : Kecamatan Purwojati dalam Angka 2020 dan 2021 diolah oleh peneliti)

Menurut tabel I.2 di atas, terlihat Desa Karangmangu merupakan desa dengan jumlah tertinggi dalam jumlah pasangan usia subur (PUS) menurut desa di Kecamatan Purwojati, 2020, yaitu dengan jumlah PUS baru sebanyak 3 dan PUS 2019 935 dengan total PUS 938.

Dalam upaya meningkatkan kembali program KB yang mulai redup, Bapak Presiden Joko Widodo mengatasmakan BKKBN melakukan kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target sasaran pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) yang mana program ini akan dijadikan salah satu sistem dalam pengentasan kemiskinan. Pada tanggal 14 januari 2016 untuk pertama kalinya Kampung KB dicanangkan oleh Presiden RI di Dusun Jenawi Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis.

Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti pencahangan Kampung KB oleh Bapak Presiden RI dibuatlah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 440/70/SJ. Kemudian adanya Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor : 8890/RC.300/J.1/2015 perihal Pembentukan Kampung KB. Surat Edaran Kepala BAPERMASPKB Kabupaten Banyumas Nomor : 476/346/2016 tentang Pembentukan Kampung KB. Selanjutnya, terdapat Surat Keputusan Camat Kecamatan Purwojati Nomor : 37 tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kampung KB RW 02 Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati. Yang terakhir, terdapat Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Banyumas.

Pada tahun 2016 Kabupaten Banyumas telah menentukan lokasi Kampung KB RW 9 Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo sebagai wilayah pertama yang dicanangkan sebagai Kampung KB percontohan di Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2016 masing-masing Kecamatan di 27 Kecamatan telah dicanangkan Kampung KB oleh Bupati Banyumas, dan pada tahun 2017 masing-masing desa telah dicanangkan Kampung KB oleh Bupati Banyumas.

Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Program Kampung KB karena ada salah satu dusun (Kalikranji) yang memiliki Pencapaian KB paling rendah di antara dusun yang lain di Desa Karangmangu.

Dalam kampung KB di Dusun Kalikranji Desa Karangmangu, kegiatan yang dilakukan untuk BKB adalah Posyandu yang dilaksanakan sebulan sekali, untuk BKL terdapat pengajian rutin setiap hari Jumat dan posyandu lansia, untuk BKR terdapat pengajian rutin setiap malam Minggu, untuk UPPKS pernah diadakan penyuluhan untuk industri/produksi rumah tangga. Adapun untuk anggaran Kampung KB berasal dari swadaya masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti ke lapangan, berikut beberapa masalah yang peneliti temukan pada Kampung KB di Desa Karangmangu, Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. *Pertama*, kurangnya partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat wajib dalam pembentukan Kampung KB yang tertulis sesuai petunjuk teknis Kampung KB oleh BKKBN, yang berarti partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R sangat berperan penting dalam pelaksanaan Kampung KB.

Tabel I.3 Presentase Partisipasi Keluarga dalam Poktan (Kelompok Kegiatan) di Kecamatan Purwojati

Kampung KB		Kelompok Kegiatan					Total
Desa	Nama Kampung KB	BKB	BKR	BKL	UPPKS	PIK-R	
Gerduren	Duren Asih	24,38 %	28,60 %	4,65 %	0,00%	26,09 %	83,72 %
Karangtalun Kidul	Pertinggi	35,67 %	0,00%	0,00 %	5,50%	0,00%	41,17 %
Kaliurip	Urip Makmur	39,33 %	0,00%	0,00 %	0,00%	9,50%	48,83 %
Karangtalun Lor	RW 3	92,56 %	0,00%	0,00 %	0,25%	0,00%	92,81 %
Purwojati	Karangduren	67,45 %	0,00%	0,00 %	0,00%	7,56%	75,01 %
Klapasawit	Dukuh Kidul	72,86 %	0,00%	0,00 %	0,00%	2,50%	75,36 %
Karangmangu	Kalikranji	1,37 %	13,40 %	8,57 %	6,60 %	9,10 %	39,04 %
Kaliputih	Kamal Jaya	77,75 %	5,34%	0,00 %	3,50%	0,00%	86,59 %
Kaliwangi	Gandulekor	36,28 %	0,00%	0,00 %	9,20%	0,00%	45,48 %
Kalitapen	Azzahra	56,32 %	0,00%	6,50 %	0,00%	2,40%	65,22 %
Kalitapen	Gandaria	38,65 %	0,00%	0,00 %	3,40%	0,00%	42,05 %

(Sumber: <http://Kampungkb.bkkbn.go.id/>)

Dapat dilihat dari presentase pada tabel 3 di atas, bahwa tingkat partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan di Kampung KB Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas masih sangat rendah yaitu untuk presentase partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita) 1, 37%, BKR (Bina Keluarga Remaja) 13,4%, BKL (Bina Keluarga Lansia) 8,57%, UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) 6,60%, dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja) 9,1 %. Bila ditotalkan presentase partisipasi keluarga pada kelompok kegiatan yaitu 39,04%.

Dari ke 11 kampung KB di Kecamatan Purwojati, partisipasi dalam kelompok kegiatan paling rendah adalah kampung KB di Desa Karangmangu yaitu dengan total partisipasi di kelompok kegiatan sebesar 39,04%.

Tabel I.4 Data Jumlah Balita, Remaja, dan Lansia pada Kampung KB di Dusun Kalikranji

Kategori	RT 001	RT 002	RT 003	RT 004	RT 005	RT 006	Total
Balita 0-5 Tahun	-	11	12	17	18	9	67
Remaja 12-25 Tahun	-	23	33	39	44	35	174
Lansia 50 Tahun Keatas	-	28	32	34	37	36	167

(Sumber: Rekapitulasi Data di Kampung KB)

Tabel I.5 Data yang Mengikuti Kegiatan Kampung KB di Dusun Kalikranji

RT	PUS	BKB	BKR	BKL	UPPKS	PIK R
RT 001	-	-	-	-	-	-
RT 002	43	7	10	5	4	5
RT 003	24	-	7	7	8	7
RT 004	14	8	8	6	-	-
RT 005	35	12	4	8	6	5
RT 006	36	10	8	8	5	8
Total	152	37	37	34	23	25

(Sumber: Rekapitulasi Data di Kampung KB)

Dari tabel 4 Data Jumlah Balita, Remaja, dan Lansia pada Kampung KB di Dusun Kalokranji dan 5 Data yang Mengikuti Kegiatan Kampung KB di Dusun Kalikranji di atas, dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat Dusun Kalikranji pada kelompok Kegiatan Kampung KB masih kurang.

Kedua, kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan program Kampung KB, terutama belum adanya rumah dataku dan sekretariat Pokja Kampung KB sehingga belum adanya mekanisme operasional seperti rapat perencanaan kegiatan, rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan, sosialisasi kegiatan, juga monitoring dan evaluasi kegiatan.

Ketiga, kurangnya koordinasi dan komitmen dengan instansi lainnya (lintas sektor), seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinsospermades, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, juga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan wilayah koordinasi lintas sektoral.

Keempat, pada Kampung KB di Dusun Kalikranji Belum adanya kepengurusan atau kelompok kerja KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang sesuai dengan 8 fungsi keluarga, sehingga belum dapat menerapkan 8 fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi Keagamaan, Sosialisasi/Pendidikan, Reproduksi, Ekonomi, Perlindungan, Kasih Sayang, Sosial Budaya, dan Pembinaan Lingkungan. Pada Kampung KB di Dusun Kalokranji kelompok kerja yang terbentuk hanya berupa ketua, sekretaris, bendahara, dan sesuai kelompok kegiatan yaitu BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas”.

B. Pembatasan Masalah

1. Dimensi Lokasi

Penelitian dilakukan di Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

2. Dimensi Waktu

Penelitian ini didasarkan pada data tahun 2020 – 2021

3. Dimensi Studi

Penelitian ini dibatasi pada Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

C. Perumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial pada umumnya dan ilmu Administrasi Negara pada khususnya.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan khususnya kepada pemerintah dalam menyelesaikan masalah serta mengambil langkah suatu kebijakan untuk menangani lebih lanjut mengenai Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.